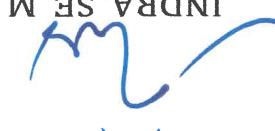
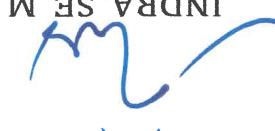
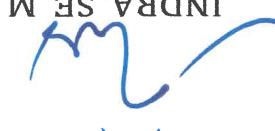


SOP PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK		 <p><b>DAN ASET DAERAH</b>  <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN</b>  <b>PEMERINTAH PROVINSI RIAU</b></p>																															
<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td> <td>TANGGAL PEMBUATAN</td> <td>TANGGAL REVISI</td> <td>TANGGAL EFEKTIIF</td> </tr> <tr> <td>5.2.1.1-19</td> <td>Februari 2022</td> <td>Februari 2022</td> <td>Februari 2022</td> </tr> <tr> <td>DISAKAN OLEH</td> <td>Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau</td> <td>INDRA, SE, M.SI</td> <td>PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK NIP. 197211151998031004</td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td><td colspan="2">KUALIFIKASI PELAKSANA</td></tr> <tr> <td colspan="2">DASAR HUKUM</td><td colspan="2">1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2010 6. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2013 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 Tahun 2017</td></tr> <tr> <td colspan="2">KETERIKATAN:</td><td colspan="2">PERLATAN/PERLENGKAPAN:</td></tr> <tr> <td colspan="2">           1. Lembaran Kerja dan Renungan Kerja            2. Term of Reference            3. Alat Tulis Kantor            4. Jaringan Internet         </td><td colspan="2">PENGATAN DAN PENDAPATAN: • Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy</td></tr> <tr> <td colspan="2">PERINGATAN:</td><td colspan="2"></td></tr> </table>		NOMOR SOP	TANGGAL PEMBUATAN	TANGGAL REVISI	TANGGAL EFEKTIIF	5.2.1.1-19	Februari 2022	Februari 2022	Februari 2022	DISAKAN OLEH	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	INDRA, SE, M.SI	PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK NIP. 197211151998031004			KUALIFIKASI PELAKSANA		DASAR HUKUM		1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2010 6. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2013 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 Tahun 2017		KETERIKATAN:		PERLATAN/PERLENGKAPAN:		1. Lembaran Kerja dan Renungan Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet		PENGATAN DAN PENDAPATAN: • Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy		PERINGATAN:			
NOMOR SOP	TANGGAL PEMBUATAN	TANGGAL REVISI	TANGGAL EFEKTIIF																														
5.2.1.1-19	Februari 2022	Februari 2022	Februari 2022																														
DISAKAN OLEH	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	INDRA, SE, M.SI	PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK NIP. 197211151998031004																														
		KUALIFIKASI PELAKSANA																															
DASAR HUKUM		1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2010 6. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2013 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 Tahun 2017																															
KETERIKATAN:		PERLATAN/PERLENGKAPAN:																															
1. Lembaran Kerja dan Renungan Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet		PENGATAN DAN PENDAPATAN: • Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy																															
PERINGATAN:																																	

» S

No	Keterangan	Pendukung					
		Pelaksana	Informasi PPID dan PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pemohon Informasi datang ke desk layanan yang merupakan perwakilan pemohonan yang telah mengisi formulir	Formulir Pemohonan Informasi Yang	Formulir Pemohonan Informasi Yang tersedia di meja pelayanan PPID atau telepon diisi lengkap dengan keterangan	10 Menit	Formulir	Pemohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau telepon diisi lengkap dengan keterangan	Pemohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau telepon diisi lengkap dengan keterangan
2.	Petugas memberikan tandabukti penyeriman	Daftrar registrasi	Buku registrasi dan/atau file khusus dalam bentuk softcopy	10 Menit	Pemohon	informasi pelayanan publik	permintaan informasi publik
3.	Petugas memproses permintaan	Maksimal 5 Hari Kerja	Daftrar informasi publik	Pemohon	informasi pelayanan publik	permintaan informasi publik	oleh pemohon informasi
4.	Petugas menyeraikan informasi sesuai dengan yang terbuka untuk publik	20 Menit	Daftrar informasi publik	Yang terbuka untuk publik	Setiap hari, maksimal 10 sepujuh)	(sejak maklumat yang diminta oleh	yang diminta masuk dalam kategori informasi publik

dikecualikan PPID  
menyampaikan alasan  
sesuai dengan  
ketentuan Peraturan  
Perundang-Undangan  
yang berlaku